

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Meningkatkan sumber daya manusia dalam pembangunan bangsa mutlak diperlukan. Salah satunya dapat dilakukan melalui pendidikan. Hal ini senada dengan pendapat Lester Frank Ward dalam Adiwikarta (1988:1) yang menyatakan ' bahwa untuk perbaikan masyarakat diperlukan pendidikan'. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dapat tercapai pengembangan intelektualnya melalui pendidikan serta penguasaan keterampilan yang memadai. Artinya masyarakat yang dibekali dengan pendidikan dan keterampilan profesional dapat dijadikan jaminan terutama dalam menghadapi problem pembangunan dan krisis multidimensi saat ini. Oleh karena itu para pelaku pendidikan perlu memahami landasan pendidikan, khususnya tujuan pendidikan setiap bangsa.

Dalam UU No 20 tahun 2003 ditegaskan bahwa "tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah membentuk warga negara menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, maka relevansinya dengan pendidikan IPS yaitu menumbuhkan pengetahuan *exstrceptive* yang kebenarannya bersifat mutlak yaitu iman dan takwa serta pengetahuan *intrceptive* yang kebenarannya bersifat relatif (Somantri, 2001:89).

Dari pernyataan di atas, tampak bahwa salah satu tradisi dari pendidikan IPS adalah membentuk warga negara yang baik (*good citizenship*), maka perlu ditumbuhkembangkan aspek-aspek kualitatif sumber daya insani dalam bersikap, penghargaan terhadap moral, tata nilai, norma dan perilaku dalam bertindak ekonomi yang disintesiskan dengan nilai budaya bangsa Indonesia, sehingga membentuk masyarakat yang bersikap mandiri dalam pembangunan berlandaskan etika, nilai dan moral bangsa.

Kemerdekaan negara kita sudah lebih 60 tahun dan pembangunan pun telah berjalan dengan berbagai rintangan dan halangan. Dalam mengisi kemerdekaan melalui pembangunan ekonomi, peranan badan usaha yang sesuai dengan karakteristik bangsa telah dipikirkan oleh para pendahulu, maka lahirlah dalam UUD 45 pasal 33 ayat 1 yang dalam penjelasannya menyatakan bahwa Koperasi sebagai badan usaha yang cocok dengan perekonomian bangsa.

Atas dasar uraian di atas, penulis menggarisbawahi suatu pertanyaan bagaimana implikasi badan usaha Koperasi terhadap kesejahteraan bangsa melalui peningkatan kinerjanya.

Dalam keadaan terpuruk sejak awal dan selama masa krisis, salah satu bentuk usaha yang tetap eksis dan tidak mengalami goncangan yang hebat sebagaimana yang dialami beberapa kalangan usaha, adalah Koperasi dan usaha kecil menengah. Usaha kecil menengah dan Koperasi memberi kontribusi yang tidak sedikit dalam mensejahterakan masyarakat di masa krisis. Hal ini terlihat dari banyaknya industri-industri kecil dan rumah tangga yang mampu menyerap tenaga kerja korban PHK perusahaan-perusahaan besar. Koperasi merupakan

bentuk badan usaha yang seharusnya menjiwai bentuk-bentuk badan usaha lainnya. Rahardjo (1997: xiv) mengemukakan mengenai Koperasi ini sebagai berikut :

Secara makro Koperasi hidup dalam tata “rangkaiian”, “rangkuman”, “konsolidasi”, “jaringan usaha”, “kerjasama”, tumbuh sekaligus merata , maju tanpa kesenjangan, membangun ekonomi sekaligus membangun sistem ekonomi dan serentak pula mencapai kesatuan ekonomi nasional yang tangguh, inilah yang harus menjadi prioritas utama untuk memperkokoh perekonomian nasional, dan itulah pembangunan sistem, restrukturisasi ekonomi untuk menghadapi dunia baru, yang disebut kerjasama nasional.

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan kerjasama nasional tersebut dibutuhkan suatu lembaga, dalam hal ini adalah Koperasi. Hal ini terbukti dari keberadaan Koperasi selama krisis berlangsung, Koperasi dapat tumbuh merata, tanpa kesenjangan di seluruh lapisan masyarakat untuk membangun kembali ekonomi nasional. Yang tak kalah penting adalah bahwa Koperasi mempunyai kedudukan yang kuat dan penting dalam tatanan perekonomian negara, sebagai soko guru perekonomian nasional. Oleh karena itu Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang cocok bagi masyarakat Indonesia, yang dapat menopang perekonomian Indonesia. Peran Koperasi dipandang penting dalam menumbuhkembangkan potensi ekonomi masyarakat serta dalam upaya mewujudkan kehidupan demokratis, kebersamaan, keterbukaan dan kekeluargaan, yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia sejak jaman nenek moyang dahulu.

Koperasi sebagai badan usaha (Pasal 1 UU No. 25 Tahun 1992) memiliki kekuatan yang berasal dari anggotanya. Identitas ganda anggota, yaitu anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna/pelanggan merupakan potensi yang dapat

dioptimalkan untuk tercapainya kemajuan Koperasi. Sebagai pemilik, anggota memberi kontribusi modal terhadap Koperasi, dan sebagai pelanggan anggota memberi kontribusi terhadap Koperasi dalam bentuk memanfaatkan pelayanan usaha yang diberikan Koperasi. Agar para anggota betul-betul mewujudkan dirinya sebagai pelanggan, maka Koperasi harus menyediakan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan para anggota. Para pengurus harus jeli dan tanggap dengan kebutuhan yang betul-betul dirasakan anggota, dengan demikian anggota akan memanfaatkan secara optimal pelayanan yang diberikan Koperasi, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi anggota dan akhirnya akan memacu keberhasilan Koperasi. Namun demikian Koperasi masih menghadapi berbagai kendala, baik kendala intern (mikro) maupun kendala ekstern (makro) dalam operasionalnya, sebagaimana diungkap oleh Dekopin dan Soewardi (1995 : 16)

Kendala intern (mikro) berupa : (1) masih lemahnya pendanaan Koperasi; (2) kurang tersedianya sumber daya manusia Koperasi; (3) perangkat lunak pembinaan belum mantap; (4) sarana fisik pembinaan belum memadai; (5) masih rendahnya partisipasi anggota. Kendala ekstern (makro) meliputi antara lain: (1) kebijaksanaan ekonomi dan keuangan kurang kondusif untuk mengembangkan Koperasi; (2) strategi dan kebijaksanaan pembangunan ekonomi belum sampai terkait secara langsung dengan butir-butir demokrasi ekonomi; (3) alokasi dana pembangunan nasional masih nampak cukup timpang dan berkembang memperkuat posisi usaha swasta. Adanya kendala-kendala tersebut ditandai dengan munculnya proses konglomerasi pemilikan usaha yang merupakan hambatan bagi pertumbuhan Gerakan Koperasi.

Uraian di atas menuntut konsekuensi bahwa untuk menumbuhkembangkan Koperasi diperlukan adanya kerjasama semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun organisasi dan gerakan Koperasi itu sendiri.

Pemerintah memang telah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan usaha Koperasi, namun perkembangan Koperasi di Indonesia masih kurang khususnya dari segi kualitas. Koperasi belum mampu memajukan dan mengembangkan kegiatan usahanya, apalagi untuk disejajarkan dengan swasta (BUMS) dan usaha negara (BUMN). Banyak faktor yang menyebabkan masih belum berkembangnya usaha Koperasi, di antaranya adalah karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan Koperasi, hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Swasono (1987:22) bahwa:

Masih rendahnya kesadaran berkoperasi di kalangan rakyat masih cukup luas, masyarakat masih belum mampu memahami dengan baik manfaat Koperasi bahwa sebenarnya Koperasi mampu memberi peluang-peluang untuk meningkatkan kesejahteraan, dengan kata lain Koperasi sebagai lembaga modern belum membudaya di kalangan masyarakat.

Pendapat tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa salah satu masalah atau hambatan bagi perkembangan Koperasi adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berkoperasi, artinya partisipasi masyarakat di dalam kegiatan usaha Koperasi masih rendah, apabila dibandingkan dengan kegiatan usaha lainnya, padahal Koperasi mampu memberi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena tujuan Koperasi adalah untuk kesejahteraan anggota, sedangkan tujuan dari badan usaha lain adalah semata-mata mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini rendahnya partisipasi anggota menjadi faktor penghambat penting dari sisi pembinaan sikap mental, moral dan tata nilai yang juga menjadi kajian dalam Pendidikan IPS.

Keanggotaan merupakan faktor yang perlu mendapat perhatian, karena keberhasilan suatu Koperasi tidak lepas dari partisipasi seluruh anggota. Koperasi

merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi, bukan suatu perkumpulan modal, sehingga partisipasi anggota sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan suatu Koperasi, karena hidup dan keberlangsungan Koperasi tergantung kepada anggotanya, tanpa adanya partisipasi anggota, Koperasi tidak akan bisa hidup dan berkembang. Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Wirasasmita (1992 : 10) :

Berdasarkan evaluasi empirik perkembangan Koperasi sangat ditentukan oleh partisipasi anggotanya, yaitu dalam :

1. Melaksanakan tugasnya sebagai pemilik yaitu secara terus-menerus membiayai perusahaan Koperasi dan menggunakan haknya dalam rapat-rapat anggota.
2. Melaksanakan tugasnya sebagai pelanggan yaitu secara terus-menerus memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh perusahaan Koperasi.

Partisipasi anggota mutlak menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan Koperasi, karena anggota selain sebagai pemilik (*owner's*), juga merupakan pelanggan/konsumen (*user's*) bagi Koperasi, sehingga partisipasi anggota dalam Koperasi harus terus ditingkatkan, hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 pasal 17 ayat (1), bahwa “Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi”.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa lemahnya partisipasi anggota menjadi faktor utama yang menghambat perkembangan usaha dari suatu badan usaha Koperasi. Permasalahan partisipasi anggota pada umumnya saat ini sangat dirasakan oleh Badan Usaha Koperasi, sehingga Koperasi mendapat kesulitan untuk memacu perkembangan usahanya. Hal ini seperti yang terjadi di Koperasi Mahasiswa (KOPMA) Bumi Siliwangi UPI.

Sejak tahun 2002, keanggotaan mahasiswa dalam organisasi KOPMA Bumi Siliwangi UPI bersifat sukarela, tidak otomatis seperti sebelum tahun 2002. Berdasarkan pengamatan awal, pada akhir tahun 2005 yang menjadi anggota Kopma sebanyak 1363 orang mahasiswa dari seluruh fakultas, padahal jumlah mahasiswa UPI yang terdaftar saat ini menurut BAAK UPI tahun 2005 berjumlah 20.974 mahasiswa. Kondisi inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian partisipasi mahasiswa dalam organisasi KOPMA Bumi Siliwangi UPI.

Kopma sebagai fasilitas pendidikan nonakademik di perguruan tinggi juga memiliki peran penting dalam membentuk sikap berwirausaha. Selain sebagai organisasi mahasiswa yang mewadahi aktivitas mahasiswa di lingkungan kampus, Kopma juga merupakan sarana mahasiswa untuk latihan dalam merintis usaha maupun latihan menjadi kader Koperasi. Di organisasi Kopma terjadi proses pendidikan yang berfungsi untuk membekali anggota agar menguasai nilai-nilai demokrasi ekonomi, bersikap kritis, demokratis, produktif dan kompetitif serta inovatif. Suherman (1998: 32) menyatakan bahwa “pelatihan adalah proses pembelajaran seseorang atau kelompok untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dan sikap (*knowledge, skill, attitude*)”. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam organisasi Kopma diperlukan pelatihan Koperasi pada anggota untuk membekali suatu pengetahuan, keterampilan dan sikap berkoperasi, yang nantinya akan meningkatkan partisipasi anggota dan menjadi dasar dalam berwirausaha, serta menciptakan kader Koperasi.

Atas dasar uraian di atas maka penulis menuangkan permasalahan penelitian di atas dalam sebuah judul tesis **Hubungan Pendidikan**



Perkoperasian Dengan Partisipasi Anggota (Suatu Kasus pada Anggota Kopma Bumi Siliwangi UPI Peserta Pendidikan dan Latihan Manajemen Koperasi)

1.2 Rumusan Masalah

Partisipasi anggota merupakan daya hidup Koperasi yang fundamental, hal tersebut dikemukakan oleh Syamsuri SA, bahwa : “Partisipasi anggota dalam Koperasi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan Koperasi, karena Koperasi itu pada dasarnya merupakan organisasi ekonomi swadaya dari, oleh, dengan dan untuk anggota“. (Syamsuri SA, 1986 : 167)

Partisipasi anggota mutlak menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan Koperasi, karena anggota selain sebagai pemilik (*owner's*), juga merupakan pelanggan/konsumen (*user's*) bagi Koperasi, sehingga partisipasi anggota dalam Koperasi harus terus ditingkatkan, hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 pasal 17 ayat (1), bahwa “anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi”.

Partisipasi anggota dalam berkoperasi merupakan proses belajar yang berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan, prinsip-prinsip ekonomi, sikap dan mentalitas agar mahasiswa kelak setelah selesai studi di UPI mampu mandiri dalam berkoperasi, dan menjadi kader Koperasi. Sejalan dengan itu, Syamsuri (1986:341) menyatakan sebagai berikut;

- (1) Ditinjau dari segi pendidikan semua variabel penelitian yaitu: persepsi, mentalitas dan partisipasi merupakan fungsi pendidikan, artinya tinggi rendahnya kuantitas dan kualitas dari variabel tergantung dari adanya

upaya pendidikan. Kualitas pengurus Koperasi bukan semata-mata bawaan tetapi merupakan hasil dari proses pendidikan.

- (2) Perlu mendapat perhatian serius dari ahli pendidikan dan para pengelola lembaga pendidikan formal agar sistem pendidikan dan proses pelaksanaan program belajar mampu menghasilkan lulusan yang berorientasi pada pekerjaan produktif yang berwawasan wirakoperasi atau setidaknya-tidaknya wiraswasta.

Melalui proses pembelajaran berkoperasi dalam keterlibatan mahasiswa di organisasi Kopma lebih menekankan pada meningkatkan partisipasi anggota yang memberikan makna penting bagi keberhasilan dan perkembangan Kopma yang pada akhirnya akan diperoleh pengalaman belajar untuk kemandirian berkoperasi di masyarakat kelak, serta terciptanya kader Koperasi yang berpengetahuan dan berketrampilan serta memiliki motivasi yang tinggi.

Proses pembelajaran dalam organisasi Kopma Bumi Siliwangi UPI yaitu pendidikan perkoperasian, yang meliputi pendidikan dasar Koperasi, pendidikan dan latihan (Diklat) manajemen Koperasi, dan pendidikan khusus. Pendidikan perkoperasian melibatkan suatu proses yang disebut proses pembelajaran serta keterlibatan instruktur pelatihan pendidikan perkoperasian.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

- 1.2.1. Bagaimanakah gambaran Proses Pembelajaran dalam pendidikan perkoperasian pada anggota Kopma Bumi Siliwangi UPI peserta Diklat manajemen Koperasi.
- 1.2.2. Bagaimanakah gambaran Kompetensi Instruktur Pelatihan dalam pendidikan perkoperasian pada anggota Kopma Bumi Siliwangi UPI peserta Diklat manajemen Koperasi.



- 1.2.3. Bagaimanakah gambaran Partisipasi Anggota Kopma Bumi Siliwangi UPI peserta Diklat manajemen Koperasi.
- 1.2.4. Bagaimanakah hubungan proses pembelajaran dengan partisipasi anggota Kopma Bumi Siliwangi UPI peserta Diklat manajemen Koperasi.
- 1.2.5. Bagaimanakah hubungan kompetensi instruktur pelatihan dengan partisipasi anggota Kopma Bumi Siliwangi UPI peserta Diklat manajemen Koperasi.
- 1.2.6. Bagaimanakah hubungan proses pembelajaran dan kompetensi instruktur pelatihan dengan partisipasi anggota Kopma Bumi Siliwangi UPI peserta Diklat manajemen Koperasi.

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Ingin mengetahui gambaran proses pembelajaran dalam pendidikan perkoperasian pada anggota Kopma Bumi Siliwangi UPI peserta Diklat manajemen Koperasi.
- 1.3.2. Ingin mengetahui gambaran kompetensi Instruktur Pelatihan dalam pendidikan perkoperasian pada anggota Kopma Bumi Siliwangi UPI peserta Diklat manajemen Koperasi.
- 1.3.3. Ingin mengetahui gambaran partisipasi anggota Kopma Bumi Siliwangi UPI peserta Diklat manajemen Koperasi.
- 1.3.4. Ingin mengetahui hubungan proses pembelajaran dengan partisipasi anggota pada Kopma Bumi Siliwangi UPI peserta Diklat manajemen Koperasi.

- 1.3.5 Ingin mengetahui hubungan kompetensi instruktur pelatihan dengan partisipasi anggota Kopma Bumi Siliwangi UPI peserta Diklat manajemen Koperasi.
- 1.3.6 Ingin mengetahui hubungan proses pembelajaran dan kompetensi instruktur pelatihan dengan partisipasi anggota KOPMA Bumi Siliwangi UPI peserta Diklat manajemen Koperasi.

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1. Dari aspek pengembangan ilmu diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap khasanah pengembangan pendidikan IPS yang multidisiplin baik ilmu ekonomi, sosiologi, psikologi dan ilmu pendidikan. Khususnya dalam pendidikan ekonomi yang membahas perkoperasian dapat menumbuhkembangkan partisipasi anggota Kopma, sehingga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi peneliti lainnya.
- 1.4.2. Secara gunalaksana sebagai sumbangan pemikiran bagi para praktisi Kopma khususnya dan pendidik serta orang tua pada umumnya, dalam rangka membina partisipasi anggota sehingga badan usaha Koperasi dapat berkembang dan maju sesuai dengan harapan dalam sistem ekonomi Indonesia yang berasaskan kekeluargaan, serta dampaknya dalam pembelajaran Pendidikan IPS dapat mewujudkan konsep manusia mandiri dalam membentuk *good citizenship* dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan

1.5 Kerangka Pemikiran

Koperasi sebagai badan usaha (Pasal 1 UU No. 25 Tahun 1992) memiliki kekuatan yang berasal dari anggotanya. Identitas ganda anggota, yaitu anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna/pelanggan merupakan potensi yang dapat dioptimalkan untuk tercapainya kemajuan Koperasi. Sebagai pemilik, anggota memberi kontribusi modal terhadap Koperasi, dan sebagai pelanggan anggota memberi kontribusi terhadap Koperasi dalam bentuk memanfaatkan pelayanan usaha yang diberikan Koperasi. Agar para anggota betul-betul mewujudkan dirinya sebagai pelanggan, maka Koperasi harus menyediakan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan para anggota. Para pengurus harus jeli dan tanggap dengan kebutuhan yang betul-betul dirasakan anggota, dengan demikian anggota akan memanfaatkan secara optimal pelayanan yang diberikan Koperasi, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi anggota yang akan memacu keberhasilan Koperasi dan akhirnya akan melahirkan kader Koperasi.

Dengan memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan, anggota akan memberikan dua keuntungan, yaitu bagi anggota dapat meningkatkan kesejahteraannya dan bagi Koperasi berdampak pada volume usaha yang meningkat. Untuk dapat mensejahterakan anggotanya, tentu Koperasi harus dapat tumbuh dan berkembang, agar Koperasi dapat tumbuh dan berkembang, maka partisipasi anggota harus ditingkatkan.

Menurut Ropke dalam Hendar dan Kusnadi (2002:87) pada dasarnya kualitas partisipasi tergantung pada interaksi tiga variabel yaitu:

- a. Para anggota
- b. Manajemen Koperasi
- c. Program

Partisipasi dalam melaksanakan pelayanan yang disediakan Koperasi akan berhasil apabila ada kesesuaian (*fit*) antara anggota, program dan manajemen. Kesesuaian antara anggota dan program adalah adanya kesepakatan antara kebutuhan anggota dan keluaran (*output*) program Koperasi. Program ini dimaksudkan sebagai kegiatan usaha utama yang dipilih atau ditentukan oleh manajemen seperti penyediaan sarana produksi, pembelian hasil produksi anggota, penjualan barang konsumsi, penyediaan fasilitas perkreditan, pelayanan jasa-jasa seperti penerimaan pembayaran rekening listrik. Telepon, PDAM dan lain-lain.

Selanjutnya kesesuaian antar anggota dan manajemen akan terjadi apabila anggota mempunyai kemampuan (kompetensi) dan kemauan (motivasi) dalam mengemukakan hasrat kebutuhannya (permintaan) yang kemudian harus direfleksikan atau diterjemahkan dalam keputusan manajemen. Di samping itu anggota diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat, saran dan kritik yang membangun untuk pertumbuhan Koperasi.

Terakhir harus ada kesesuaian antara program dan manajemen, di mana tugas dari program harus sesuai dengan kemampuan manajemen untuk melaksanakan dan menyelesaikannya. Jadi efektifitas partisipasi merupakan fungsi dari tingkat kesesuaian antara anggota, manajemen dan program. Atau diformulasikan sebagai berikut:

$$P = f(a,m,p)$$

(Hendar Kusnadi, 2002:88)

Di mana

a = Anggota

m = Manajemen

p = Program

P = Partisipasi

Dari pendapat di atas, penulis memfokuskan kesesuaian antara anggota dan manajemen yang merangsang anggota untuk mempunyai kemampuan (kompetensi) serta kemauan (motivasi). Menurut penulis untuk merangsang kompetensi dan motivasi anggota tidak lain melalui pendidikan.

Dalam memaknai keterlibatan anggota dalam organisasi Kopma berarti bahwa adanya keikutsertaan individu atau berperannya sikap atau emosi individu dalam situasi tertentu pada anggota dalam organisasi Kopma.

Secara psikologis keikutsertaan mahasiswa sebagai anggota Kopma dapat berbentuk keikutsertaan secara fisik atau secara emosional saja. Dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan keterlibatan anggota yang aktif serta ikut dalam pendidikan perkoperasian yaitu pendidikan dasar Koperasi serta Diklat manajemen Koperasi. Oleh karena itu proses menjadi keanggotaan mereka diharapkan didasari oleh kesadaran masing-masing anggota.

Dalam hal ini Syamsuri (1997:40) menyatakan “ pola pengorganisasian dan pengembangan Kopma dilihat dari prosesnya menjadi anggota. Apakah diserahkan sepenuhnya atas kesadaran masing-masing mahasiswa atau diwajibkan karena pertimbangan pendidikan”.

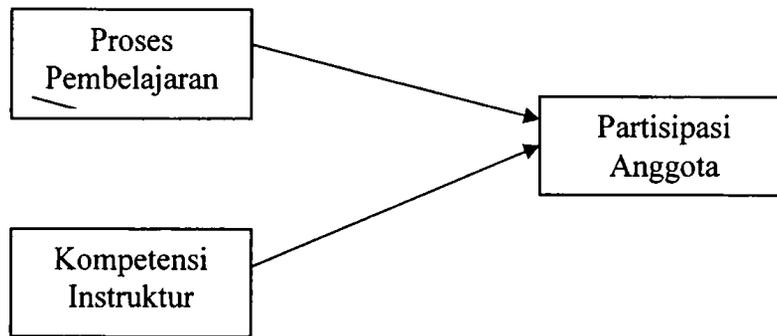
Di KOPMA Bumi Siliwangi UPI diselenggarakan pendidikan perkoperasian yang meliputi pendidikan dasar Koperasi, Diklat manajemen Koperasi dan pendidikan khusus.

Pendidikan perkoperasian merupakan suatu proses, di mana di dalamnya terdapat beberapa faktor dalam menentukan keberhasilan partisipasi anggota dalam Kopma. Faktor-faktor tersebut di antaranya terdapat suatu proses pembelajaran yang berkualitas sebagai seperangkat proses belajar mengajar dalam menyampaikan materi-materi perkoperasian yang akan disampaikan pada peserta dengan demikian peserta akan mengetahui dan memahami seluk beluk perkoperasian.

Apabila peserta tahu, mengerti, dan memahami tentang perkoperasian, dimana nilai-nilai demokrasi ekonomi tertanam dalam diri anggota KOPMA peserta Diklat manajemen Koperasi cenderung akan melakukan kegiatan partisipasi dalam KOPMA dan diharapkan akan menimbulkan rasa memiliki dan tanggung jawab atas KOPMA serta akan melahirkan kader Koperasi.

Sedangkan faktor lainnya yaitu terdapat guru atau instruktur yang kompeten dalam menyampaikan materi pelatihan. Kedua faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi anggota.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik benang merah dan kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 1. 1

Kerangka Berpikir Penelitian

1.6 Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai sebuah kesimpulan yang belum final, masih harus dibuktikan kebenarannya seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2004:70) bahwa “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.”

Berangkat dari kerangka pemikiran di atas, dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis yang dirumuskan menjadi hipotesis mayor dan hipotesis minor.

Hipotesis mayor sebagai berikut:

“Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Proses Pembelajaran dan Kompetensi Instruktur Pelatihan dengan Partisipasi Anggota ”.

Hipotesis minor sebagai berikut:

1. "Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Proses Pembelajaran dengan Partisipasi Anggota".
2. "Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kompetensi Instruktur Pelatihan dengan Partisipasi Anggota".

1.7 Asumsi

Pengertian asumsi menurut Sastradipoera (2000:23) yaitu:

- a. Sebagai falsafah penggunaan atau pengambilan minor dalam silogisme.
- b. Perkiraan anggapan atau pengandaian bahwa sesuatu itu benar.
- c. Suatu fakta atau pernyataan yang dianggap benar.
- d. Sesuatu yang dianggap tidak mempengaruhi atau dianggap konstan ; konstanta

Asumsi merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian yang akan menjadi titik tolak pandangan dan kegiatan dalam menentukan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan pengertian di atas, maka penulis merumuskan asumsi bagi penelitian ini sebagai berikut:

- 1.7.1. Sistem ekonomi yang cocok pada era milenium ke-3 ini adalah sistem ekonomi Koperasi dan sistem ini sesuai dengan amanat konstitusi yaitu UUD 1945 pasal 33 ayat (1) dan penjelasannya. (Syamsuri SA. 2002)
- 1.7.2. Banyak faktor yang menyebabkan masih belum berkembangnya usaha Koperasi Indonesia, diantaranya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berkoperasi, yaitu masih rendahnya partisipasi anggota dalam kegiatan usaha Koperasi. (Sri Edi Swasono. 1987)
- 1.7.3. Partisipasi anggota sebagai pilar keberhasilan Koperasi atau dapat dijadikan sebagai alat ukur keberhasilan Koperasi. Artinya partisipasi anggota

sebagai faktor yang dominan dalam menentukan keberhasilan Koperasi.

(Roepke Jochen. 2000)

1.7.4. Apabila pendidikan Koperasi diintensifkan baik dari segi pendekatan materi dan metodologi belajar, mengajar, maka kuantitas dan kualitas partisipasi berkoperasi para anggota akan meningkat. (Jacob Muhammad.1986)

1.8 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Subyek penelitian ini adalah mahasiswa UPI yang menjadi anggota organisasi Kopma Bumi Siliwangi yang telah mengikuti pendidikan dasar Koperasi, serta pendidikan dan latihan manajemen Koperasi. Lokasi dilaksanakan di kampus UPI, Jalan Setiabudhi 229 Bandung. Pelaksanaannya di Auditorium FPMIPA pada tanggal 23 - 25 Desember 2005. Waktu penelitian mulai 1 Oktober 2005 sampai dengan 31 Desember 2005.